

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Komunikasi Politik

##### 1) Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah sebuah frase terdiri dari dua kata “komunikasi” dan “politik” yang mempunyai makna dan pengertian tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah digabungkan dua kata tersebut jadilah sebuah pengertian yang lebih luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli. Komunikasi politik menurut Mc Nair yang dikutip oleh Hafied Cangara murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda.<sup>1</sup>

Komunikasi politik kemudian digunakan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan per-politikan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu, atau rakyat dalam konteks yang lebih besar. Sehingga proses pencapaian tujuan komunikator-komunikator tersebut bisa tercapai sebagaimana mestinya. Dalam kondisi seperti di atas, biasanya saluran komunikasi yang digunakan melalui media massa, baik dengan bentuk rapat umum, konferensi pers, dan lain-lain. Baiklah, kita ambil contoh sederhana dari para calon wakil rakyat yang akhir-akhir ini semakin intens untuk berkomunikasi dan "dekat" dengan rakyat, mengkampanyekan keunggulan atau kelebihan mereka kepada khalayak, dengan menaruh harapan pada media massa pada umumnya untuk mendapatkan "anggukan kepala" khalayak bahwa "ya, kami memilihmu". Tentunya, dalam konteks seperti ini komunikasi yang digunakan oleh calon-calon wakil rakyat tersebut termasuk komunikasi politik dengan gaya retorika mereka masing-masing.

---

<sup>1</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 36.

## 2) Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain, untuk membentuk citra politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan public opinion atau pendapat umum, dan untuk ikut dalam pemilihan umum serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Terdapat berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi politik, namun bentuk-bentuk yang sudah biasa digunakan oleh para politikus adalah:

### a. Retorika politik

Berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *rhetorica*, yang berarti seni berbicara. Asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling memengaruhi sehingga bersifat kegiatan antarpersona. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada orang banyak (khalayak).<sup>2</sup>

### b. Propaganda politik

Propaganda (menyemaikan tunas suatu tanaman) adalah suatu salah bentuk kegiatan yang sudah lama dalam bidang politik. Penggunaan propaganda politik secara intensif dalam politik adalah dilakukan oleh Hitler (NAZI) dalam perang dunia II. Yaitu dengan melakukan kebohongan dengan cara menyebarkan ideologi NAZI (fasisme) untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Sebelumnya propaganda digunakan dalam bentuk kegiatan keagamaan (umat katolik), yaitu pada tahun 1622, Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi cardinal yaitu *congregation de propaganda fide*, untuk menambahkan keimanan kristiani.<sup>3</sup>

### c. Agitasi politik

Berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu *agitare*, yang artinya bergerak atau menggerakkan dan dalam bahasa Inggris, *agitation*. Menurut Harbert Blumer yang dikutip oleh Anwar Arifin, agitasi dilakukan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat, kemudian

---

<sup>2</sup> Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 65.

<sup>3</sup> Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 66.

menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan) dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan massa.<sup>4</sup>

d. Kampanye politik

Bentuk kampanye komunikasi ini yang paling menarik dan semarak dilakukan menjelang hari pemilihan kampanye politik. Kampanye politik termasuk bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Kampanye politik adalah penciptaan ulang, dan pengalihan lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi.<sup>5</sup>

Ada berbagai macam kampanye politik diantaranya sebagai berikut: Pertama, dengan menggunakan media massa atau disebut juga dengan istilah persuasif massa. Metode ini biasanya dilakukan dalam bentuk “imbauan kepada massa dilakukan baik melalui hubungan tatap muka ataupun melalui jenis media perantara, yaitu: media elektronik, media cetak, atau poster.”<sup>6</sup> Kedua, kampanye interpersonal, adalah kampanye yang dilakukan terhadap diri sendiri atau lebih kepada sikap-sikap pribadi. Hal-hal yang biasanya “dilakukan oleh para kandidat (atau istrinya, kerabat dekat, dan juru bicara utama) dalam setting yang relative informal.”<sup>7</sup> Ketiga, kampanye organisasi. Didalam kampanye organisasi yang dilakukan adalah “mengerahkan anggota, dan memberikan tekanan kepada calon pejabat: serikat buruh, asosiasi perusahaan, kelompok agrikultur, organisasi hak sipil, lobby konsumen, pencinta lingkungan.” Hal tersebut semuanya dilakukan agar suara mengarah kepada kandidat yang berkompentensi dalam pemilu.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 66

<sup>5</sup> Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Rosdakarya), hlm. 173.

<sup>6</sup> Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Rosdakarya), hlm.195

<sup>7</sup> Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Rosdakarya), hlm 205

<sup>8</sup> Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Rosdakarya), hlm 206

### 3) Strategi Komunikasi Politik

#### a. Pengertian Strategi Komunikasi

Dari segi etimologi, kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *stratagos* yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer, yang berarti memimpin. Dalam konteks awalnya, strategi diartikan *generalship* atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang, Sehingga tidak mengherankan jika pada awal perkembangannya istilah strategi digunakan populer di lingkungan militer.<sup>9</sup> Strategi komunikasi merupakan perpaduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatannya bisa berbedabeda tergantung pada suatu kondisi dan situasi.<sup>10</sup> Strategi Komunikasi perlu disusun secara luwes, sehingga taktik operasionalnya komunikasi dapat segera disesuaikan dengan fakto-faktor yang berpengaruh. Untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif, seorang strategis komunikasi perlu memahami sifat-sifat komunikasi dan pesan, guna dapat menentukan jenis media yang akan diambil dan teknik komunikasi yang akan ditetapkan.<sup>11</sup>

#### b. Pemahaman Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan dalam kemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan saja yang hanya menunjukkan peta arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Setiawan Hari Purnomo dan Zuelkiflimansyah, *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1999), hlm. 8

<sup>10</sup> Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek....*, hlm. 10.

<sup>11</sup> Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek....*, hlm. 12

<sup>12</sup> Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek....*, hlm. 32

Politik dan strategi merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan apabila mengejar tujuan berpolitik dalam pemenangan pemilu atau pilkada. Sementara itu strategi juga membutuhkan taktik, prasyarat dalam sebuah perencanaan adalah adanya perencanaan strategi. Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya dapat memiliki arti apabila sebuah strategi direncanakan secara teliti. Jadi perencanaan taktik dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, akan melakukan apa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa. Keputusan taktis semacam ini digunakan untuk mencapai setiap tujuan strategis. Keputusan-keputusan ini terutama tergantung pada pengenalan akan ruang lingkup, kerangka prasyarat, dan kemampuan pribadi. Oleh karena itu, perencanaan taktis hendaknya tidak direncanakan dari tingkat strategis, melainkan oleh pimpinan yang ada di tingkat taktis, karena hanya disinilah pengetahuan yang dibutuhkan berada.<sup>13</sup> Strategi komunikasi politik dalam konteks pilkada, memiliki peran sentral dalam agenda meraih kemenangan. Seorang kandidat dalam hal ini tidak hanya mengandalkan popularitas maupun posisinya sebagai kandidat incumbent saja, namun ada strategi komunikasi politik yang bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan tempat dimana kontestasi diselenggarakan. Apabila untuk kandidat yang kurang memiliki popularitas di mata masyarakat, tentu membutuhkan atau mencari strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan visi misinya untuk memenangkan pertarungan antar kandidat dalam pilkada.<sup>14</sup> Strategi komunikasi politik dalam konteks pemerintahan, digunakan untuk membuat dan menerapkan aturan-aturan khususnya di dalam proses pemilihan umum dengan cara meningkatkan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya serta menyalurkan kebijakan-kebijakan sehingga wujud menciptakan sebuah komunikasi timbal balik antara suprastruktur dan infrastruktur politik dalam mempersiapkan sebuah pilkada.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Schroder, Strategi Politik, (Jakarta: Friedrich-Noumann-Stiftung, 2004), hlm. 11

<sup>14</sup> Schroder, Strategi Politik, (Jakarta: Friedrich-Noumann-Stiftung, 2004), hlm. 12

<sup>15</sup> Schroder, Strategi Politik, (Jakarta: Friedrich-Noumann-Stiftung, 2004), hlm. 12

c. Tahapan-Tahapan Strategi Komunikasi Politik

Menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Akan lebih baik apabila dalam strategi itu diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut.<sup>16</sup> Menurut para pakar, Tahapan-tahapan strategi komunikasi sebagai berikut:

1) Mengamati Permasalahan.

Merupakan gabungan dari aktivitas-aktivitas seperti meneliti, mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap serta perilaku masyarakat yang memiliki kepentingan terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan. Sehingga mereka mencari dan berpatokan terhadap karakter public atau masyarakat. Ini merupakan pengetahuan dasar dari strategi komunikasi yang akan diimplementasikan.

2) Perencanaan dan Pembuatan Program

Setelah informasi dan data terkumpul, dalam rangka untuk menyusun program, tujuan, tindakan serta strategi komunikasi. Ini dilakukan apabila karakteristik masyarakat sudah diketahunya, karena bagaimanapun perencanaan dan program adalah tahap lanjutan dari tahap pengamatan permasalahan dari kondisi dan situasi di masyarakat.

3) Mengambil Tindakan Berkomunikasi

Tahap ini adalah implementasi dari perencanaan dan program yang telah diagendakan secara matang. Bagaimana mendisain citra atau image seefektif mungkin untuk menarik perhatian masyarakat. Ini dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan pesan-pesan yang disampaikan secara komunikatif.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja

---

<sup>16</sup> Schroder, Strategi Politik, (Jakarta: Friedrich-Noumann-Stiftung, 2004), hlm. 14

<sup>17</sup> Schroder, Strategi Politik, (Jakarta: Friedrich-Noumann-Stiftung, 2004), hlm 15.

dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan didala dirinya sendiri.

Partai politik merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Keberadaan setiap partai politik ditentukan oleh dua factor yang *pertama*, status hokum partai politik sebagai badan hokum (*rechtspersoon*), sehingga dapat menjadi subjek yang diakui sah un tuk melakukan perbuatan hokum pada umumnya. Sedangkan yang *kedua*, status partai politik tersebut dalam kegiatan pemilu, yaitu apakah partai itu berhak menjadi peserta atau tidak ditentukan oleh sejauh mana partai politik yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu.<sup>18</sup>Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas, peranan kelas menengah yang tercerahkan, tersedianya ruang publik bagi masyarat, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara.

Partai politik sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan dari konstiten yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan kenegaraan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Miriam Budiardjo, bahwa partai politik merupakan sarana bagi warga negara utuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

Partai politik adalah kunci penting dalam proses berjalannya demokrasi di suatu negara. Apalagi jika kita menganalisisnya dari sisi filosofis dimana dalam konsep awal lahirnya demokrasi, partai politik merupakan suatu representasi dari suatu tatanan masyarakat yang beradab. Sebuah tatanan dimana segala aspirasi setiap individu tersampaikan dan terakomodir dalam proses perumusan politik. Begitu

---

<sup>18</sup> M.Afrien, "Strategi Pemegang Partai Amanat Nasional dala Pemilu Legislatif 2014", Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, <https://onesearch.id/Record/IOS4109.29433> diakses pada 16 Januari.

pentingnya kedudukan parpol, sehingga sering dikatakan pula, tidak ada demokrasi tanpa kehadiran parpol di dalamnya. Walaupun begitu, perlu digaris bawahi bahwa, pertama, sistem demokrasi hanya bisa bekerja apabila parpol juga bekerja dalam suatu kerangka sistem kepartaian yang mendukung dan memungkinkan demokrasi bekerja. Kedua, tidak semua partai politik bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi. Ketiga, demokrasi tidak semata-mata identik dengan jumlah parpol, seolah-olah semakin banyak jumlah parpol maka suatu negara semakin demokratis

Menurut Michael G. Roskin mengatakan partai politik sebagai sarana dan alat dalam hubungan rakyat-pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan warga negara dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat. Artinya elit dan kader partai harus menjadi pejuang aspirasi rakyat. Kemampuan partai politik memperjuangkan aspirasi rakyat akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan partai politik didalam institusi pemerintahan. Partai dapat dipercaya rakyat adalah partai yang mampu berinteraksi dengan rakyat secara intensif.

Dengan interaksi tersebut, partai politik dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui proses interaksi, pesan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan akan dapat ditangkap oleh partai politik. Realitas sosial hanya dapat dimengerti dan dipahami melalui proses interaksi. Pemahaman realitas sosial tidak dapat dilakukan dalam ruang-ruang diskusi ditingkat elit dan dinternal partai politik. Kemampuan partai politik memecahkan permasalahan rakyat secara langsung meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap keberadaan elit dan kader partai politik.

Karena itu, para elit dan kader partai harus berupaya berinteraksi dengan rakyat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis. Selain perbaikan seperti di atas, hemat saya untuk mewujudkan partai politik pejuang aspirasi rakyat dibutuhkan perbaikan manajemen (pengelolaan) partai yang mengedepankan asas-asas demokrasi pada konteks kaderisasi dan penataan sumber keuangan partai politik. Kedua hal ini sangat penting untuk diperbaiki guna mewujudkan eksistensi partai politik sebagai pejuang aspirasi rakyat.

Kaderisasi yang baik akan mewujudkan kader-kader partai yang berintegritas dan moralitas tinggi, Partai politik yang mengabaikan peran dan fungsinya sebagai pejuang

aspirasi rakyat, mengabaikan demokrasi, dan membudayakan politik dinasti secara langsung menjadikan bangsa dan negara semakin terpuruk. Karena itu, diharapkan ditahun pemilu ini partai politik dapat mengoptimalkan fungsi kerakyatannya, mampu berinteraksi dengan masyarakat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis, dan berupaya memperbaiki kaderisasi dan penataan sumber keuangan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, partai politik akan semakin mantap sebagai pilar demokrasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Di samping menyangkut aspek teknis penyelenggaraan, pemilihan umum dengan sistem multipartai ekstrim juga berpotensi melahirkan konfigurasi kekuatan politik yang seimbang di parlemen karena sulitnya melahirkan partai pemenang pemilihan umum dengan perolehan suara yang signifikan untuk membentuk pemerintahan. Akibatnya, koalisi harus dibentuk untuk membangun blok-blok kekuatan dalam kerangka.

Dalam demokrasi, partai berada dan beroperasi dalam suatu sistem kepartaian tertentu. Setiap partai merupakan bagian dari sistem kepartaian yang diterapkan di suatu negara. Dalam suatu sistem tertentu, partai berinteraksi dengan sekurang-kurangnya satu partai lain atau lebih sesuai dengan konstruksi relasi regulasi yang diberlakukan. Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang struktur persaingan di antara sesama partai politik dalam upaya meraih kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

Gelombang demokratisasi yang telah melanda negara-negara Afrika sejak tahun 1980-an misalnya, ditandai oleh pembentukan kembali politik multi partai. Hal ini sebagian besar terjadi di negara dengan sistem politik yang dalam jangka panjang secara de facto dan de jure membatasi kemampuan partai politik untuk berfungsi secara efektif. sementara banyak partai politik di “negara-negara demokrasi baru” lainnya masih menghadapi hambatan dan ketentuan hukum serta administratif yang sangat membatasi kebebasan mereka.

Adanya konstitusi yang mengartikulasikan nilai dan prinsip demokrasi tidak mencukupi untuk pembentukan sistem politik yang demokratis dalam praktik. Namun, sama benarnya bahwa sebuah konstitusi demokratis adalah sebuah kondisi

yang mendahului pembangunan konstitusionalisme yang demokratis.<sup>19</sup>

### 1) Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan dapat disebut sebagai sistem yang berada di suatu Negara, tersusun dari berbagai jenis elemen yang ada, setiap elemen mempunyai kegunaan masing-masing yang akan membentuk sistem menjadi satu kesatuan.

Sistem sendiri dapat diartikan sebagai tatanan susunan ataupun struktur, serta jaringan yang memiliki keterkaitan fungsional di seluruh bagiannya dari sistem tersebut.

Dengan pernyataan tersebut secara singkat sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden, dapat disimpulkan bahwa semua pemerintahannya Negara diatur dan dipimpin oleh seorang presiden.

Menurut Juan Linz, seperti dikutip Syamsuddin Haris, pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif di dalam sistem presidensial cenderung menimbulkan polarisasi dan instabilitas politik, sehingga dianggap tidak cocok diterapkan di negara demokrasi baru. Kesulitan lain yang muncul akibat perpaduan sistem ini antara lain.

- a. pertama, sulitnya melembagakan format koalisi permanen di antara partai-partai tanpa mayoritas di parlemen.
- b. Kedua, lemahnya disiplin partai-partai dalam mempertahankan, Sementara itu, kombinasi sistem presidensialisme dan multipartai bukan hanya merupakan “kombinasi yang sulit”, melainkan juga membuka peluang terjadinya kebuntuan politik (deadlock) dalam hubungan eksekutif-legislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial.

### 2) Sistem Parlementer

Dalam Sistem pemerintahan ini Problematika yang tidak kalah penting adalah menyangkut parlemen pemerintah (DPR-Presiden). Pemilihan umum dengan jumlah partai yang terlalu banyak yang berdampak pada

---

<sup>19</sup> A.H.Y. Chen, “A Tale Of Two Islands: Comparative Reflections On Constitutionalism In Hong Kong And Taiwan”, Hong Kong Law Journal, Vol. 37, 2007, hlm. 647

tidak adanya partai pemenang pemilihan umum dengan perolehan suara mayoritas yang signifikan, karena suatu Negara memiliki dua pemimpin seperti presiden dan perdana menteri terlebih lagi jika parlemen justru dikuasai oleh partai atau koalisi partai yang berbeda dengan partai atau koalisi partai.

Sistem presidensial dan multi partai membangun adalah hal yang sangat wajar dan umum terjadi. Koalisi partai politik terjadi karena untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen merupakan hal yang sangat sulit. Namun masalahnya adalah koalisi yang dibangun di dalam sistem, khususnya di Indonesia, tidak bersifat mengikat dan permanen.<sup>20</sup>

Dengan terciptanya sistem kepartaian yang lebih sederhana maka akan mendorong koalisi partai politik yang lebih ramping, disiplin dan mengikat. Upaya untuk mendorong agar supaya partai politik membangun koalisi yang disiplin dan mengikat. Pertama, memperbaiki disiplin internal partai politik masing-masing. Partai politik harus mampu mengontrol anggota-anggotanya di parlemen untuk mengikuti kebijakan partainya.

Dari sisi kualitas, setiap partai memiliki kesempatan dan keinginan serta kemampuan untuk berkompetisi melaksanakan fungsi secara optimal dalam sebuah mekanisme yang kondusif. Keberadaan partai tidak semata-mata ditentukan rezim yang tengah berkuasa atau sebuah mekanisme administratif yang diciptakan secara tidak adil dan demokratis oleh penguasa secara sepihak, Sistem Parlemerter Di negara-negara dengan sistem parlemerter, pemindahan kekuasaan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya terkadang ditandai oleh negosiasi yang panjang guna memperoleh keuntungan atas keputusan komposisi dan kebijakan kabinet baru.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Partono, “*Sistem Multi Partai, Presidensial dan Persoalan Efektifitas Pemerintah*”, makalah, 2010, hlm. 3.

<sup>21</sup> Lieven De Winter, Arco Timmermans, dan Patrick Dumont, “*Belgium: On Government Agreements, Evangelists, Followers and Heretics*”, dalam Wolfgang C. Müller dan Kaare Strøm (Editor), 2000, *Coalition Governments in Western Europe*, Oxford, Oxford University Press, hlm. 315.

Hal ini hampir selalu benar secara empiris dan bukan pertanyaan teoritis terbuka. Meskipun kita mungkin memikirkan model yang masuk akal yang memperlakukan pemerintah mayoritas partai tunggal sebagai koalisi faksi partai, ini bukan fokus dari literatur yang kita hadapi. Dalam ranah empirik, pengalaman pemerintahan koalisi bervariasi antar Negara.

### 1. Tujuan Partai Politik

Tujuan organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut partai politik. Tujuan pembentukan suatu partai politik disamping yang utama adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu Negara, juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukan.

### 2. Fungsi Partai Politik

Setiap partai politik disetiap Negara demokrasi cukup penting. Terutama jika dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawakan. Partai politik menerjemahkan kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pemerintah. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideology tertentu. Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam system politik demokrasi melakukan tiga kegiatan, meliputi seleksi calon-calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan, legislatif atau eksekutif.

### 3. Klasifikasi Partai Politik

Banyak jenis dan bentuk partai politik yang hidup dan berkembang di dalam suatu kehidupan ketatanegaraan. Berkaitan dengan hal inilah, maka pada hakikatnya klasifikasi partai politik dapat digambarkan sebagai berikut yaitu:

- 1) *Partai Massa*, yakni suatu partai politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas.
- 2) *Partai Kade*, yaitu suatu partai politik yang lebih mementingkan keketan organisasi dan disiplin eserta anggotanya. Pemimpin partai politik biasanya menjaga kemurnian doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calonanggotanya secara ketat.

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dengan tujuan untuk melengkapi kajian penelitian yang berjudul “*Strategi Komunikasi Politik anggota Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kudus*”. Ada beberapa penelitian terdahulu yang akan meneliti jelaskan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arasy, mahasiswa dari universitas Muhammadiyah Makasar, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, skripsinya yang berjudul “**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK POLITIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN GOWA PADA KONSTITUEN DAERAH PEMILIHAN V KECAMATAN DAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA**” Skripsi dari Muhammad Arasy ini memiliki kesamaan dalam mengkaji analisis Strategi Komunikasi Politik, namun juga ada letak perbedaan yaitu terdapat subjek Variabel yang diteliti. Penelitian yang diteliti Muhammad Arasy mengangkat tentang Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada konstituen Daerah dan bontonompo selatan Kabupaten Gowa, sebagai subjek pembahasannya, tetapi penelitian ini lebih condong ke pembahasan yang mengenai Strategi Komunikasi Politik Anggota Partai Amanat Nasional DPRD kabupaten kudus, sebagai variable yaitu Partai Amanat Nasional dalam menyerap aspirasi kepa masyarakat dari calon legislatif Boediono selaku ketua umum Partai Amanat Nasional Kabupaten Kudus.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Pada penelitian ini data deskriptif yang ingin dihasilkan adalah data mengenai bentuk-bentuk komunikasi politik, topic agenda permasalahan pada kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Kab. Gowa. Peneliti akan melihat kinerja anggota DPRD Kab. Gowa baik secara kelompok maupun perorangan dalam kegiatan yang dilakukan yaitu berupa partisipasi dalam bentuk dialog, bantuan materi. Serta menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Eko Priyo Utomo, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam jurnalnya yang berjudul “**STRATEGI KOMUNIKASI DALAM**

**MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT ADAT OLEH ANGGOTA DPRD KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT**". Jurnal dari Eko Priyo Utomo ini bahwa penelitiannya memiliki kesamaan dalam mengkaji strategi komunikasi politik, namun juga ada letak perbedaannya yaitu terdapat pada variable penelitian. Penelitian yang diteliti oleh Eko Priyo Utomo mengangkat strategi komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat adat oleh anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat sebagai subjek pembahasannya, tetapi penelitian ini lebih condong pada pembahasan yang mengenai startegi komunikasi politik Partai Amanat Nasional sebagai subjek.

Penelitian ini menggunakan metode penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara menda;am, dan studi kepustakaan. Sealama penelitian melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti juga melakukan analisis data.

Dalam strategi komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dari Eko Priyo Utomo terdapat empat faktor penting yang harus diperhatikan yaitu mengenal khalayak, menentukan pesan, menetapkan metode, dan pemilihan media komunikasi. Dari hasil penelitian, dalam pemenuhan empat faktor tersebut, masing-masing anggota DPRD berbeda dalam pelaksanaannya. Perbedaan tersebut lebih dikarenakan oleh karakteristik kelompok masyarakat adat, tatanan adat, asal usul anggota DPRD, dan pokok permasalahan yang terjadi. Dengan begitu, strategi komunikasi, dalam menyerap aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni berbeda dari tiap anggota, dan tidak memiliki satu model perencanaan yang tetap.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rifqi Ridho, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam skripsinya yang berjudul **"STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PADA PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KABUPATEN TEGAL"**. Skripsi dari Mochamad Rifqi Ridho ini bahwa penelitiannya memiliki kesamaan dalam mengkaji strategi komunikasi politik, namun juga ada

letak perbedaannya yaitu terdapat pada subjek yang diteliti. Penelitian skripsi yang diteliti oleh Mochammad Rifqi Ridho mengangkat tentang strategi komunikasi politik dalam perolehan suara partai persatuan pembangunan pada pemilu legislatif pada tahun 2009 di Kabupaten Tegal, sebagai subjek penelitiannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian oleh Mochammad Rifqi Ridho ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan format desain deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan serta pengaruh dari suatu fenomena.



### C. Kerangka Berfikir

